

## PELUNCURAN PETA NKRI



Pencanangan Gerakan Menebar Sejuta Peta untuk Negeri

Dalam rangkaian Hari Informasi Geospasial ke 48, Badan Informasi Geospasial meluncurkan Peta NKRI 2017 di Titik Kilometer Nol, Pulau Weh, Kota Sabang, Jumat 15 September 2017. Titik Kilometer Nol sekaligus sebagai penanda dimulainya Gerakan Menebar Sejuta Peta. Lokasinya berada di ujung barat Pulau Weh. Peluncuran NKRI tersebut dilakukan Kepala Badan Informasi Geospasial, Hasanuddin Z Abidin, didampingi Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dan Walikota Sabang Zulkifli Adam, bersama para undangan yang berasal dari Kementerian/Lembaga terkait, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Aceh, murid-murid perwakilan sekolah, dan masyarakat sekitar.

Kepala BIG memaparkan bahwa Peta NKRI 2017 terdapat pembaharuan yang sangat signifikan terutama terkait batas maritim Indonesia. Selain itu, telah mengakomodir perubahan wilayah administrasi pemerintahan sesuai Permendagri Nomor 56 Tahun 2015

tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan serta Keppres Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-pulau Kecil Terluar. Pemerintah Aceh melalui Gubernur Irwandi Yusuf menyambut gembira atas peluncuran Peta NKRI 2017 ini di Titik Kilometer Nol, Kota Sabang. Peluncuran peta mengambil tempat strategis di beranda depan nusantara sehingga penuh makna. Selain bermakna menambah keberkahan bagi Aceh dan Pulau Weh yang merupakan beranda terdepan NKRI, peluncuran ini menjadi pemicu semangat warga lain dalam memperkuat kedaulatan NKRI. Pada kesempatan yang sama, Walikota Sabang menambahkan bahwa sebagai kawasan wisata bertaraf nasional dan internasional, peta yang akurat akan dibutuhkan oleh banyak pihak untuk perencanaan pembangunan di wilayah ini. Di akhir acara peluncuran, dibagikan ratusan peta produk Badan Informasi Geospasial kepada masyarakat Aceh, sekaligus menandai Pencanangan Gerakan Menebar Sejuta Peta untuk Negeri. [Niendyawati, 2017]



Peluncuran Peta NKRI 2017 di Titik Kilometer Nol, Sabang, Pulau Weh



PPTRA's Family in Action



Tim Futsal dan official PPTRA

Di Acara Hari Informasi Geospasial 2017

## Hari Informasi Geospasial 2017

PPTRA - BIG  
UPDATE AKURAT DAN  
DAPAT DIPERTANGGUNG  
JAWABKAN

PROGRES ASISTENSI & SUPERVISI  
PETA TATA RUANG



Pelepasan Balon Dalam Rangka Menyambut Hari Informasi Geospasial 2017

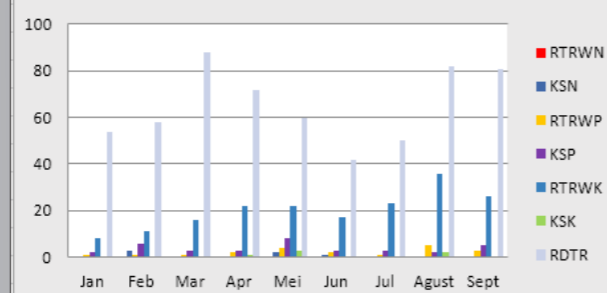


Pembukaan Acara Hari Informasi Geospasial 2017

### Data Asistensi dan Supervisi Peta Tata Ruang Periode Januari - September

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sep	Jml
RTRWN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KSN	0	3	0	0	2	1	0	0	0	6
RTRWP	1	1	1	2	4	2	1	5	3	20
KSP	2	6	3	3	8	3	3	2	5	35
RTRWK	8	11	16	22	22	17	23	36	26	181
KSK	0	0	0	1	3	0	0	2	0	6
RDTR	54	58	88	72	60	42	50	82	81	587

### Asistensi dan Supervisi Pemetaan Tata Ruang Periode Januari - September 2017



Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi :

PUSAT PEMETAAN TATA RUANG DAN ATLAS  
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL  
Gedung F Lantai 2  
Jl. Raya Jakarta-Bogor Km 46, Cibinong, Bogor

Telp - PPTRA : (021) 8764613  
Fax - PPTRA : (021) 8764613  
Email : redaksi.pta@gmail.com  
Twitter : @pta\_big



# TATA RUANG & ATLAS NEWSLETTER

MEDIA INFORMASI PEMETAAN TATA RUANG, DINAMIKA SUMBERDAYA DAN ATLAS



Memasuki bulan September ini kami disibukkan dengan tiga kegiatan penunjang strategis yaitu peluncuran (*launching*) Peta NKRI di Kota Sabang, sosialisasi pemetaan tata ruang perdesaan di Kabupaten Tuban, dan Rakornas BKPRD (Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah) di Jakarta. *Launching* Peta NKRI sangat strategis karena dihadiri oleh Kepala BIG Prof. Dr. Hasanuddin Z. Abidin dan Gubernur Provinsi Aceh Irwandi Yusuf sebagai deklarasi batas terbaru wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Demikian pula sosialisasi pemetaan tata ruang perdesaan di Desa Kesamben, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban dihadiri anggota DPR RI Komisi VII, Sementara Rakornas BKPRD di hadiri Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN dan seluruh Sekretaris Daerah dari 34 Provinsi Indonesia.

*Launching* NKRI adalah implementasi kerjasama PPTRA dengan pusat lain di BIG dan Kementerian/Lembaga lainnya. Hasil ini



## ISU STRATEGIS & INFO KEBIJAKAN

Menganggap wilayah perbatasan sebagai halaman belakang merupakan paradigma lama yang harus ditinggalkan. Saat ini wilayah perbatasan menjadi beranda depan yang perlu terus dibangun dan diperhatikan. Salah satu Program Nawacita dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo adalah memprioritaskan pembangunan wilayah pinggiran, perbatasan, dan desa. Hal ini telah ditindaklanjuti oleh Badan Informasi Geospasial dengan berbagai program kegiatan, sesuai tugas dan fungsi masing-masing unit teknis.

Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas pada tahun 2017 telah mengimplementasikan Program Nawacita tersebut, salah satunya dengan melakukan penyusunan Dataset Atlas dan Pemetaan Sosial Wilayah Perbatasan di Kalimantan. Kegiatan ini merupakan langkah strategis BIG mengingat wilayah perbatasan menjadi prioritas pembangunan. Melalui Bidang Atlas dan Pemetaan Sosial dilakukan penyusunan dataset berbasis keruangan yang terfokus pada aspek ekonomi dan sosial. Kedua aspek tersebut merupakan aspek penting, sekaligus merupakan bagian dari tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yaitu dalam upaya menyejahterakan rakyat. BIG sebagai badan yang menyelenggarakan dan atau mengintegrasikan data/ informasi geospasial



Fasilitas kesehatan di Kec. Sajingan Besar, Kab. Sambas

memastikan dukungannya terhadap pelaksanaan percepatan kawasan perbatasan sekaligus sebagai bagian dari dukungan SDGs di tingkat lokal. Ketersediaan data/informasi geospasial wilayah perbatasan merupakan bagian penting dalam rangka membantu dan mendorong peningkatan pembangunan di wilayah perbatasan.

Pertengahan September 2017, PPTRA telah melakukan survei terkait sosial ekonomi di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Survei dilakukan di Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, dan di Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan. Kedua wilayah tersebut merupakan pintu negara dan menjadi beranda terdepan yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia, serta menjadi akses perlintasan pelintas batas selain di Entikong dan Badau. Dalam survei tersebut dilakukan pendataan dan *tagging* lokasi beberapa fasilitas seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan sosial ekonomi lainnya. Data hasil survei ditambah data sekunder lainnya akan menjadi dataset Informasi Geospasial (IG) yang bermanfaat untuk mendukung pengelolaan ruang wilayah perbatasan, serta membantu menyelesaikan permasalahan yang sering muncul di wilayah perbatasan. [Niendyawati, 2017]



Fasilitas PLBN Aruk yang sangat megah di Desa Sebunga, Kec. Sajingan Besar, Kab. Sambas

### REDAKSI:

| Penanggung Jawab : Kepala Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas | Tim Redaksi: Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas |  
| Editor: Fakhruddin Mustofa, Sri Eka Wati, Roswidyatmoko D., Ellen Suryanegara, Marhensa Aditya Hadi, Chintia Dewi, Rakyana Paksi, Rochmad Budi S., I Made Dipta S. | Desain Tata Letak: Ika Rosalika |

## BIG Verifikasi Rencana Pengembangan Infrastruktur Pendukung KEK Tanjung Lesung

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) tidak dapat terlepas dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) suatu kabupaten/kota. KEK dan RTRW haruslah selaras dan saling mendukung. Di dalam KEK tentunya direncanakan ruang yang dapat digunakan untuk mendukung tujuan dari RTRW dan begitu juga sebaliknya. KEK perlu didukung dengan pembangunan akses dan infrastruktur yang terlokasikan dalam RTRW.



Survei KEK Tanjung Lesung

KEK Tanjung Lesung berlokasi di wilayah Kabupaten Pandeglang. KEK di ujung barat Pulau Jawa ini perlu dukungan pembangunan akses dan infrastruktur seperti pembangunan jalan tol, pelabuhan, bandara, dan reaktivasi stasiun kereta api. Pembangunan tersebut diharapkan dapat mendukung perkembangan wilayah Kabupaten Pandeglang dan khususnya KEK Tanjung Lesung.

Pada minggu ke-2 September 2017, tim Bidang Pemetaan Dinamika Sumberdaya melakukan pengecekan lokasi pembangunan akses dan infrastruktur yang direncanakan. Terdapat dua pintu keluar tol yang telah direncanakan yaitu di Kecamatan Panimbang dan Kecamatan Patia. Pembangunan Bandara yang awalnya di Kecamatan Panimbang kemungkinan akan pindah di Kecamatan Sobang. Reaktivasi Kereta api akan dimulai dengan menghidupkan kembali lintasan kereta dari Rangkasbitung-Labuan, serta Saketi-Panimbang. Meskipun demikian, hasil survei lapangan menunjukkan pembangunan fisik belum dimulai. Menurut informasi yang diperoleh dari Bappeda Pandeglang, hal itu terjadi karena masih terkendala pada masalah pembebasan lahan. [I Made Dipta Sudana, 2017]

## Kali Pertama, BIG Kenalkan Atlas Taktual kepada Masyarakat Penyandang Disabilitas Netra Tanah Rengong



Uji Coba Peta Taktual untuk Penyandang Disabilitas Netra

Badan Informasi Geospasial (BIG) melalui Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas (PPTRA) kembali melaksanakan kegiatan pembelajaran pembacaan atlas taktual. Kegiatan yang berlangsung pada tanggal 13-14 September 2017 di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Rumah Sejahtera Boujroh Meukarya (RSBM), berlokasi di Desa Ladong, Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Selain untuk mensosialisasikan Informasi Geospasial (IG) kepada para penyandang disabilitas netra, kegiatan ini juga bertujuan

untuk menguji keterbacaan simbol taktual yang tertera pada atlas taktual dengan tema persebaran industri di Indonesia yang saat ini tengah disusun oleh BIG. Peserta pembelajaran terdiri dari guru-guru dan siswa-siswi tunanetra.

Kegiatan yang bertema "Mengetahui NKRI Melalui Atlas Taktual" ini dihadiri langsung oleh Kepala BIG, Prof. Dr. Hasanuddin Zainal Abidin, M.Sc., didampingi oleh pejabat struktural BIG, antara lain Kepala PPTRA, Dr. Ir. Mulyanto Darmawan, M.Sc., dan Kepala Bidang Atlas dan Pemetaan Sosial, Dra. Niendyawati, M.Sc. Dalam pengarahannya, Kepala BIG menyatakan bahwa atlas taktual ini merupakan langkah strategis BIG dalam pemanfaatan IG bagi penyandang disabilitas netra. Di masa mendatang, BIG akan terus meningkatkan pemanfaatan IG dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi digital dan bersifat lebih aplikatif dalam kehidupan sehari-hari para penyandang disabilitas netra. Beliau menambahkan, di masa yang akan datang, BIG diharapkan dapat menghasilkan atlas taktual yang menggambarkan ruang angkasa.

Kepala UPTD RSBM, Drs. Ilyas Basyah, M.Sc. mengungkapkan syukur dan berterima kasih kepada BIG atas terselenggaranya kegiatan pembelajaran pembacaan atlas taktual ini di institusi yang dipimpinnya. Kegiatan ini

merupakan pengalaman pertama bagi UPTD RSBM dan diakuinya sangat dibutuhkan untuk meningkatkan cakrawala berpikir para penyandang disabilitas netra. Harapannya, kegiatan ini dapat terus ditingkatkan terutama dalam hal transfer ilmu pengetahuan dari tenaga ahli BIG kepada guru-guru disabilitas netra terkait dengan pemanfaatan atlas taktual.

Pelaksanaan kegiatan yang merupakan bagian dari rangkaian peringatan hari IG ini, BIG dibantu oleh Lembaga Dria Manunggal yang dipimpin oleh Drs. Setia Adi Purwanta, M.Pd. yang juga merupakan seorang tunanetra. Para peserta mengatakan bahwa sebelumnya mereka hanya dapat mendengar dan tidak punya gambaran sama sekali tentang geografi wilayah Indonesia. Mereka tidak pernah dapat membayangkan sebelumnya letak Kota Medan, seperti apa bentuk Pulau Sulawesi, di mana Pulau Miangas, sebesar apa Pulau Lombok, bagaimana deretan pulau-pulau di sebelah barat Pulau Sumatera, dan gambaran lainnya tentang tanah air. Dengan menggunakan indera raba di jemarinya, para penyandang disabilitas netra kini menjadi paham sehingga dari mereka sering kita dengar satu pernyataan singkat namun penuh makna, "Oh... ternyata begini.." [Randhi Atiqi, 2017]



## PPIDS ITB Mendapatkan Training of Trainer (ToT) Pemeriksaan Peta Rencana Tata Ruang

Mengingat kebutuhan pelaksanaan asistensi dan supervisi peta rencana tata ruang yang semakin banyak, BIG menginisiasi kerjasama dengan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Provinsi Jawa Barat dan Pusat Pengembangan Infrastruktur Data Spasial (PPIDS) ITB untuk melakukan percepatan pelaksanaan asistensi dan supervisi. Sebagai bagian dari percepatan tersebut, BIG menyelenggarakan Training of Trainer (ToT) pemeriksaan peta RDTR kepada BKPRD dan PPIDS.

ToT diselenggarakan di Kota Bandung selama dua hari pada tanggal 22-23 Agustus 2017 dan dibuka oleh Kepala Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas, Dr. Ir. Mulyanto Darmawan, M.Sc. Dalam sambutannya, Kapus PPTRA menyampaikan pentingnya peran PPIDS dan BKPRD dalam mendukung pelaksanaan konsultasi perpetaan tata ruang. PPIDS dan BKPRD dapat menjadi fasilitator pelaksanaan konsultasi perpetaan tata ruang di provinsi masing-masing.

Dalam ToT tersebut, turut hadir perwakilan dari pemerintah Kabupaten Bandung Barat, Sumedang, Indramayu, dan Tasikmalaya yang berada di regional Provinsi Jawa Barat untuk melaksanakan konsultasi perpetaan RDTR. Konsultasi (supervisi) dilaksanakan oleh tim PPIDS didampingi oleh tim teknis BIG. [Rochmad, 2017]



ToT Pemeriksaan Peta RDTR Jawa Barat

## Pelibatan PPIDS UGM Untuk Percepatan Peta Rencana Detail Tata Ruang

Dalam rangka percepatan proses validasi peta rencana tata ruang, khususnya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Badan Informasi Geospasial (BIG) mulai melibatkan PPIDS dalam proses asistensi. PPIDS yang terlibat meliputi PPIDS Institut Teknologi Bandung untuk region Jawa Barat, PPIDS Universitas Gadjah Mada untuk region DIY, serta PPIDS Institut Teknologi Sepuluh November untuk region Jawa Timur.

BIG juga telah melakukan ToT (Training of Trainer) yang dilakukan secara bertahap sejak tahun 2016 hingga akhir pada tahun 2017. Kegiatan ToT merupakan pelatihan mekanisme proses asistensi, mulai dari pemeriksaan sumber data, peta dasar, peta tematik, peta rencana hingga album peta. Kedepannya, keterlibatan PPIDS diharapkan dapat mempercepat proses validasi peta Rencana Tata Ruang karena sejak tahun 2017 sudah banyak daerah yang memulai proses revisi RTRW.

Akhir Agustus 2017, Tim dari Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas, kembali melakukan ToT kepada PPIDS UGM. Selain itu, tim juga bertemu dengan Sekretaris Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang membahas dokumen kerjasama terkait pelibatan PPIDS tersebut. Keterlibatan PPIDS diharapkan dapat mengakselerasi proses validasi peta RDTR. [Chintia Dewi, 2017]



ToT Pemeriksaan Peta RDTR Bersama Pemerintah DIY



Kerjasama dalam Rangka Pemeriksaan Peta RDTR Bersama PPIDS dan Pemerintah DIY

## Pentingnya Akurasi Informasi Geospasial Sumberdaya Air



WS Serayu Bogowonto yang memiliki luas 7.525 Km<sup>2</sup> merupakan bagian dari 15 Daerah Aliran Sungai (DAS) Prioritas Nasional. Wilayahnya terbagi dalam 15 (lima belas) DAS yaitu DAS Serayu, Tipar, Ijo, Donan, Telomoyo, Luk Ulo, Wawar, Cokroyasan, Bogowonto, Majingklak, Watu

Gumulung, Jemenar, Jintung, Mangli, dan DAS Suwuk. Wilayah sungai ini juga melewati delapan kabupaten, yaitu Kabupaten Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, sebagian Kabupaten Cilacap, dan sebagian Kabupaten Kulon Progo.

Pada tanggal 11-15 September 2017, Bidang Pemetaan Dinamika Sumberdaya melakukan survei lapangan kegiatan Pemetaan Neraca Spasial Sumberdaya Alam Terintegrasi Wilayah Sungai Serayu Bogowonto. Survei lapangan difokuskan pada verifikasi koordinat pos duga air. Pos duga air adalah bangunan yang digunakan untuk mengamati perubahan (fluktuasi) tinggi muka air dengan menggunakan alat pencatat duga air otomatis (AWLR - Automatic Water Level Recorder). Umumnya pos duga air diletakkan di pinggir aliran sungai atau di dekat bendung. Verifikasi koordinat ini penting dilakukan untuk memenuhi akurasi data informasi geospasial dalam rangka menyusun peta neraca sumberdaya air WS Serayu Bogowonto.

Pencarian lokasi titik pada 52 pos duga air di lapangan menjadi tantangan tersendiri. Di lapangan ditemukan koordinat lokasi yang tertera pada data sekunder berbeda jauh dengan lokasi di lapangan. Akses jalan yang rusak dan licin serta tidak mudah dilalui menjadi tantangan yang menguras cukup banyak energi. Kepuasan akan datang apabila pos duga air yang dicari telah ditemukan. [Prita Brada Bumi, 2017]



Survei lapangan kegiatan Pemetaan Neraca Spasial Sumberdaya Alam Terintegrasi Wilayah Sungai Serayu

## RTH 30%! Resolusi (Kota) Hijau

RTH sebagai penyeimbang ekosistem kota, baik itu sistem hidrologi, klimatologi, keanekaragaman hayati, maupun sistem ekologi lainnya, bertujuan meningkatkan kualitas lingkungan hidup, estetika kota, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat (quality of life, human well being). Sebuah petikan kalimat disampaikan penulis dalam pengantar buku yang menggambarkan pentingnya fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Bagian awal buku ini memaparkan latar belakang pentingnya RTH yang dibutuhkan untuk menjaga kelangsungan hidup. Dilanjutkan dengan penggambaran kondisi di lapangan dimana banyak ditemukan RTH yang telah berubah fungsi menjadi bangunan yang berdampak kepada kondisi keseimbangan

lingkungan.

Pada bagian berikutnya dipaparkan mengenai peranan RTH sebagai infrastruktur hijau. Selain itu, disajikan juga uraian terkait pengertian, penentuan, dan penerapan Koefisien Dasar Hijau (KDH). Pembahasan diperdalam dengan evaluasi terkait kuantitas, kualitas, dan pengembangan RTH.

Kemudian pada bagian akhir buku ini disampaikan mengenai upaya-upaya untuk mewujudkan RTH sebesar 30% serta strategi-strategi yang dapat ditempuh untuk mencapai hal tersebut. [Rochmad, 2017]

## RESENSI BUKU



Judul Buku : RTH 30%! Resolusi (Kota) Hijau  
Penyusun : Nirwono Joga dan Iwan Ismaun  
Penerbit : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011